

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024 ini melihat dari evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak serta. Rencana Kerja 2024 ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra 2021-2026. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik Pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan tahun 2024, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya, terima kasih.

Purbalingga, 28 Juli 2023
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	48
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD	50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	74
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	74
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	76
3.3 Program dan Kegiatan	80
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	86
BAB V PENUTUP	94
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUB)	xviii
LAMPIRAN	96
Register Resiko Bappelitbangda Tahun 2023	97
gender Analysis Pathway (GAP) Bappelitbangda Tahun 2023.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Sampai dengan Tahun 2023	7
Tabel II.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.....	19
Tabel II.3.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel II.4.	Perbandingan komponen Perencanaan AKIP Tahun 2016 s.d 2022 Kabupaten Purbalingga.....	21
Tabel II.5.	Perbandingan Nilai AKIP dan komponen Perencanaan Tahun 2019 s.d 2022	22
Tabel II.6.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Penjelasan	24
Tabel II.7.	Nilai Setiap Komponen SAKIP Bappelitbangda Tahun 2022.....	26
Tabel II.8.	Rekapitulasi Konsistensi Jumlah dan Nomenklatur Program RKPD 2023 dan RPJMD 2021-2026	29
Tabel II.9.	Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Bappelitbangda Tahun 2022	32
Tabel II.10.	Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Litbang Bappelitbangda Tahun 2022.....	34
Tabel II.11.	Penerapan dan Fasilitasi Kelanjutan Inventor Purbalingga Tahun 2015 – 2022.....	34
Tabel II.12.	Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022	36
Tabel II.13.	Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022	41
Tabel II.14.	Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022	41
Tabel II.15.	Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2022	42
Tabel II.16.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.....	45
Tabel II.17.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga.....	51
Tabel III.1.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	80
Tabel III.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024.....	81
Tabel IV.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1. Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2019 s.d 2022.....	23
Grafik II.2. Perbandingan Skor Perencanaan Tahun 2019 s.d 2022	23



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkon;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,



[Handwritten Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



[Handwritten Signature]
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkong;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. penetapan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga:
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 72);

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk memberikan acuan dan panduan dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2024 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2022 didasarkan pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
Sampai dengan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	7	8	$9=(8/7)*100$	10	$11=10+8$	$12=(11/4)*100$	
			Indikator	Satuan							
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01	PERENCANAAN										
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	100	100	100	100	100	100	
		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100	persen	100	100	100	100	100	100	
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	$9=(8/7)*100$	10	$11=10+8$	$12=(11/4)*100$
			Indikator	Satuan						
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja dan RTP	12	dokumen	2	1	50	2	3	25
5.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, dan RB) yang tersusun	25	Laporan	5	5	100	5	10	40
5.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan anggaran yang di tindaklanjuti	100	Persen	100	100	100	100	100	100
5.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	155	Orang/bulan	31	29	93.5	31	60	38.7

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
5.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/ undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	1280	Dokumen	265	298	112.5	265	563	44.0
5.01.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	6010	dokumen	1202	613	51.0	1202	1815	30.2
5.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	500	persen	100	100	100	100	200	40
5.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	10	laporan	2	4	200	2	6	60
5.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	55	orang	11	7	63.6	11	18	32.7
5.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	55	orang	11	7	63.6	11	18	32.7
5.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindaknya administrasi umum penunjang operasional kantor	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan listrik yang tersedia	30	jenis	6	6	100	6	12	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	$9=(8/7)*100$	10	$11=10+8$	$12=(11/4)*100$
			Indikator	Satuan						
5.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	295	jenis	59	59	100	59	118	40
5.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	120	eksemplar	24	24	100	24	48	40
5.01.01.206.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya jamuan tamu	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.206.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	3	jenis	3	3	100	3	6	200
5.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36	buah	9	11	122.2	9	20	55.6
5.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29	unit	8	10	125	8	18	62.1
5.01.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarpras Gedung Kantor yang Tersedia	5	jenis	1	1	100	1	2	40
5.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	10	jenis	2	2	100	2	4	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
5.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi, jasa internet	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10	jenis	2	5	250	2	7	70
5.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor petugas kebersihan, penjaga malam, operator komputer, pengemudi	70	Orang/bulan	168	168	100	168	336	480
5.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	60	bulan	12	12	100	12	24	40
5.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	165	unit	29	29	100	29	58	35.2
5.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	50	unit	25	25	100	25	50	100
5.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	unit	1	1	100	1	2	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
	Lainnya									
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan	100	persen	100	87.5	87.5	100	187.5	187.5
		Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program	84.2	persen	81.7	82.98	101.6	83	82.99	98.6
		Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.201.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah usulan perencanaan yang ditelaah	1420	usulan	284	284	100	284	568	40
5.01.02.201.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan	25	berita acara	5	5	100	5	10	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
		diikuti								
5.01.02.201.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	15	dokumen	3	3	100	3	6	40
5.01.02.202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.202.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan	15	masukan	3	3	100	3	6	40
5.01.02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.203.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota	10	laporan	2	2	100	2	4	40
5.01.02.203.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan	20	laporan	4	4	100	4	8	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah	kinerja pembangunan tahunan								
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	98.82	persen	96.46	79.05	81.9	96.46	87.8	89
		Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang ekonomi	98.37	persen	95.12	94.78	99.6	95.12	95.0	97
		Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	98.25	persen	94.74	100.00	105.6	94.74	97.4	99
5.01.03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	170	dokumen	34	34	100	34	68	40
5.01.03.201.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	140	dokumen	28	28	100	28	56	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	pembangunan bidang pemerintahan yang disinkronisasikan								
5.01.03.201.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang di sinkronisasikan	30	dokumen	6	6	100	6	12	40
5.01.03.201.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Terfasilitasinya program-program pemerintah pusat(Stunting, SDGs, AUSTS, Pemberdayaan perempuan dan anak	20	kegiatan	4	4	100	4	8	40
5.01.03.202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang perekonomian dan SDA	30	dokumen	6	6	100	6	12	40
5.01.03.202.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang di sinkronisasikan	20	dokumen	4	4	100	4	8	40
5.01.03.202	Koordinasi	Terfasilitasinya	15	kegiatan	3	3	100	3	6	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
.04	pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	program-program pemerintah pusat (Kemiskinan, Road map pangan dan gizi, PEL)								
5.01.03.202.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disinkronisasikan	10	dokumen	2	2	100	2	4	40
5.01.03.203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen renja, renstra dan laporan kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	30	dokumen	6	6	100	6	12	40
5.01.03.203.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disinkronisasikan	10	dokumen	2	2	100	2	4	40
5.01.03.203.05	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah	Terfasilitasinya program-program pemerintah pusat (keciptakarya, persampahan, air	20	kegiatan	4	4	100	4	8	40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=(8/7)*100	10	11=10+8	12=(11/4)*100
			Indikator	Satuan						
	bidang infrastruktur	bersih air minum, permukiman)								
5.01.03.203.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembanguna daerah bidang kewilayahan yang disinkronisasikan	20	dokumen	4	4	100	4	8	40
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	40	persen	34.29	96.20	280.5	34.29	130.5	326.2
5.05.02.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan invensi yang difasilitasi	350	inovasi	70	184	262.9	70	254	72.6
5.05.02.204.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inventor yang mengikuti krenova Jumlah rekomendasi izin penelitian	200	inventor	40	8	20	40	48	24
			1250	ijin	250	281	112.4	250	531	42.5
			35	PT	7	8	114.3	7	15	42.9
5.05.02.204.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	10	Workshop	2	2	100	2	4	40

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2023, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 4 (empat) Program pada Renja Tahun 2022, yaitu meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dari keempat program kewenangan Bappelitbangda realisasi hampir seluruhnya mendekati/sesuai/melebihi target. Untuk mencapai kinerja program Bappelitbangda melaksanakan 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Dari 15 kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai/jauh dari target. Kegiatan/sub kegiatan tersebut yaitu:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
2. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
3. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun

2022 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPELITBANGDA dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel II.2.
Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Skor Perencanaan	Angka	21	21,86	104,10
1.1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	72	75,26	104,53
1.2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	96	97,52	101,58
1.3	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	75	99,43	132,58
	Rata-rata capaian kinerja					112,89

Pada tabel di atas terdapat 1 (satu) tujuan Strategi dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari keempat indikator tersebut, telah mencapai realisasi lebih dari target yang telah ditetapkan yakni dengan nilai capaian antara 100% hingga lebih. Untuk rata-rata capaian kinerja Bappelitbangda dari 4 (empat) indikator kinerja mencapai 112,89%.

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2022 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2022. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel II.3.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2022, BAPPELITBANGDA telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga di tahun 2022 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 112,89% atau kategori “**Sangat Tinggi**”. Adapun seluruh pencapaian kinerja Bappelitbangda dapat diuraikan, sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas

dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2022 nilai AKIP komponen perencanaan belum dapat dinilai karena penilaian SAKIP Kabupaen dikeluarkan pada tribulan pertama pada tahun berikutnya. Nilai AKIP komponen perencanaan dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 nilai AKIP komponen perencanaan dengan nilai 21,86. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 21,14. Jika dibandingkan dengan dengan tahun 2016 selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 3,3 dan dapat dikatakan rata-rata kenaikan selama 5 (lima) tahun sebesar 0,66. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2016 dan 2022 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel II.4.
Perbandingan komponen Perencanaan AKIP Tahun 2016 s.d 2022
Kabupaten Purbalingga**

Komponen yang dinilai	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Capaian Renstra s/d 2022
Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,15	20,02	20,14	21,14	21,86	104,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	B	B	B	B	B

Adapun kinerja utama Bappelitbangda yaitu Nilai AKIP Komponen Perencanaan. Nilai AKIP dan Komponen Perencanaan Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten sekitar dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

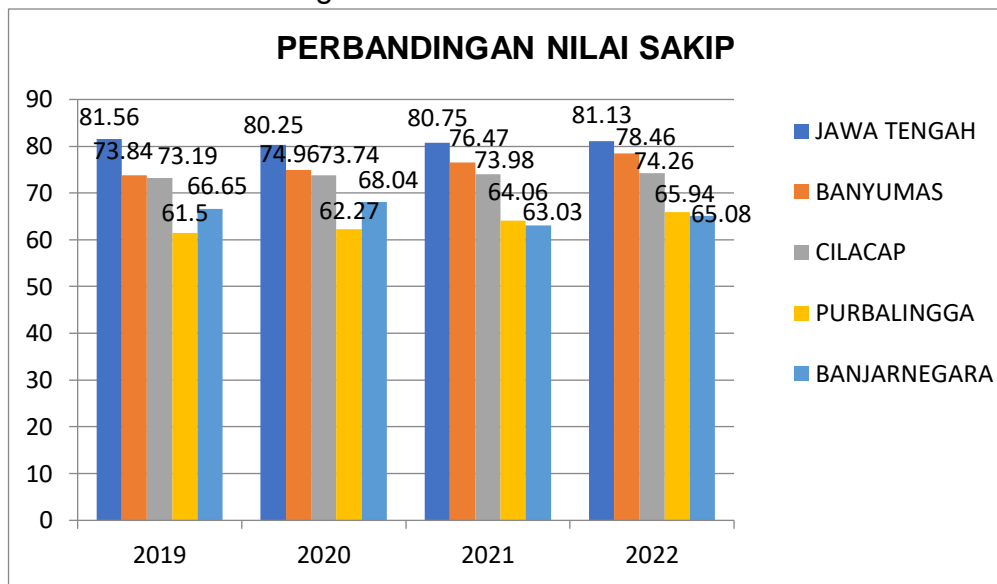
Tabel II.5.
Perbandingan Nilai AKIP dan komponen Perencanaan
Tahun 2019 s.d 2022

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP				SKOR PERENCANAAN			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	PROVINSI JAWA TENGAH	81,56	80,25	80,72	81,13	26,38	26,64	26,66	25,53
2	KABUPATEN BANYUMAS	73,84	74,96	76,47	78,46	21,13	23,89	24,00	25,20
3	KABUPATEN CILACAP	73,19	73,74	73,98	74,26	23,39	23,49	23,54	23,70
4	KABUPATEN PURBALINGGA	61,50	62,27	64,06	65,94	20,02	20,14	21,14	21,86
5	KABUPATEN BANJARNEGARA	66,65	68,04	63,03	65,08	21,64	22,00	22,08	22,20

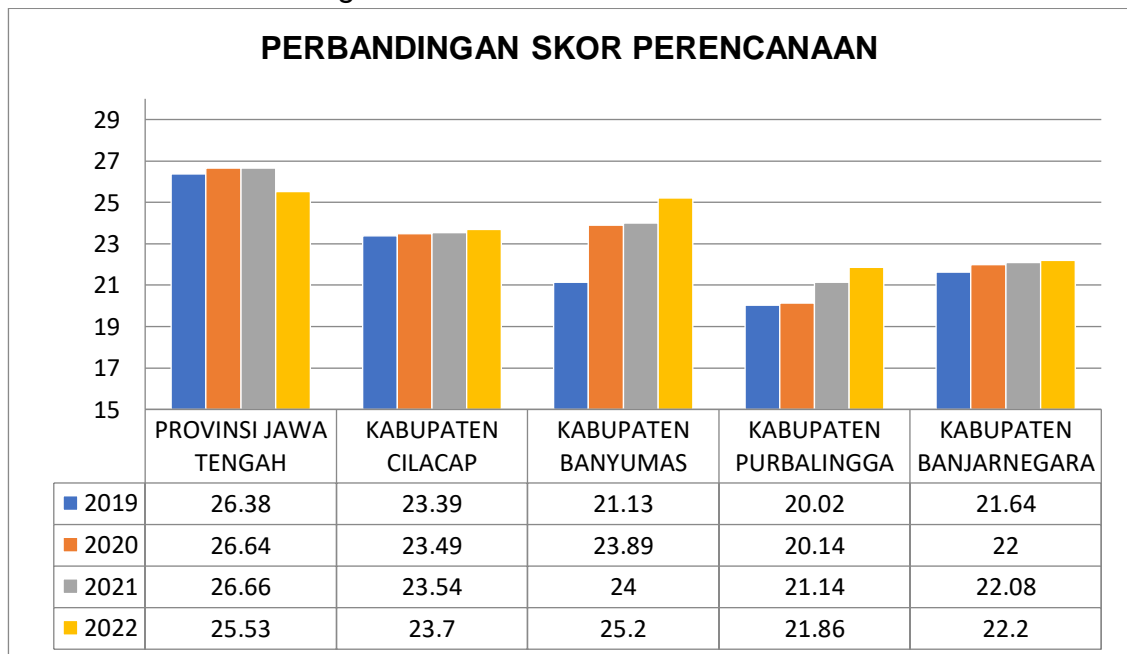
Nilai AKIP Kabupaten Purbalingga dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal tersebut menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa, Kabupaten Purbalingga pencapaian target SAKIP dengan kenaikan mencapai 4,44. Pada Tahun 2022 Kabupaten Purbalingga lebih tinggi nilai AKIP 0,86 dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 65,08 dan berada dibawah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 81,13, Kabupaten Banyumas dengan nilai 78,46, Kabupaten Cilacap 74,26. Untuk mencapai nilai AKIP tersebut terdapat komponen perencanaan yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menjadikan komponen perencanaan sebagai kinerja utama perangkat daerah yang dapat menggambarkan kinerja

perencanaan kabupaten. Pada tahun 2022 AKIP skor perencanaan jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan mencapai angka 0,72. Perbandingan Nilai Akip dan Komponen Perencanaan dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik II.1.
Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2019 s.d 2022



Grafik II.2.
Perbandingan Skor Perencanaan Tahun 2019 s.d 2022



Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya kualitas kelembagaan bappelitbangda, meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan, dan meningkatnya peran kelitbangdan dalam pembangunan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

- 1) Nilai SAKIP Bappelitbangda
- 2) Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
- 3) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangdan

Adapun penjelasan terkait pencapaian sasaran kinerja Bappelitbangda tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.6.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Penjelasan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Sasaran 1 :		
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Bappelitbangda • Formulasi Pengukuran: • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah • Sumber Data : LHE SAKIP dari Inspektorat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Sasaran 2 :		
Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan	Tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah program, indikator, target RKPD}}{\text{Jumlah program, indikator, target RPJMD}} \times 100$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah • Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah
Sasaran 3 :		
Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui pemanfaatan hasil kelitbangan pada pembangunan daerah • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah inovasi dan invensi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi dan invensi yang didesiminasikan}}$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Perangda Penanggungjawab: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah • Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah

a. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda

Sasaran pertama pada urusan perencanaan khususnya untuk meningkatnya kualitas kinerja kelembagaan Bappelitbangda yaitu Nilai SAKIP Bappelitbangda. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penguatan akuntabilitas kinerja

merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Berdasarkan penilaian SAKIP dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa hasil atas Evaluasi SAKIP pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 mendapatkan nilai 75,26 atau predikat “BB”, yang berarti bahwa Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut:

Tabel II.7.
Nilai Setiap Komponen SAKIP Bappelitbangda
Tahun 2022

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30	6	7,2	10,5	23,7
2	Pengukuran Kinerja	30	4,2	6,3	12	22,5
3	Pelaporan Kinerja	15	2,7	3,6	5,25	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,5	5,25	8,75	17,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	16,4	22,35	36,5	75,26

b. Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD

Indikator sasaran kedua urusan perencanaan berupa tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari program/kegiatan yang direncanakan pada tahun berkenaan (tahun 2022) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 dengan RPJMD periode 2021-2026 yang harus dilaksanakan pada Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah direvisi kedalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun 2023 telah disesuaikan dengan peraturan diatas dan sesuai dengan program RPJMD 2021-2026. Program RPJMD 2021-2026 sejumlah 135 dan program RKPD Tahun 2023 yang digunakan sejumlah 131. Berdasarkan perbedaan jumlah tersebut dikarenakan terdapat beberapa program RPJMD 2021-2026 yang tidak digunakan sehubungan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah akan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) dan pemenuhan target Standar pelayanan Minimal serta pencapaian sasaran pembangunan. Program RPJMD 2021-2026 yang tidak digunakan pada Program RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 2) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- 3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - 4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- Fasilitasi provinsi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penetapan dokumen RKPD. Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2023 dan RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8.
Rekapitulasi Konsistensi Jumlah dan Nomenklatur Program RKPD 2023 dan RPJMD 2021-2026

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SELURUH OPD	1	1	0/6	6/0	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan	DINDIKBUD	3	3	0/5	5/0	
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	4	4	0/8	8/0	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU - PR	6	5	0/6	6/1	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINRUMKIM	5	5	0/5	5/0	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP, BPBD	2	2	0/3	3/0	
6	Sosial	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/5	5/0	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
7	Tenaga Kerja	DINNAKER	4	4	0/4	4/0	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/7	7/0	
9	Pangan	DKPP	4	4	0/4	4/0	
10	Pertanahan	DINRUMKIM	3	3	0/3	3/0	

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPd	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Lingkungan Hidup	DLH	9	9	0/9	9/0	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL	4	3	0/7	6/1	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINPERMASDES	4	4	0/4	4/0	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSDALDUK KBP3A	3	3	0/5	5/0	
15	Perhubungan	DINHUB	1	1	0/2	2/0	
16	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	2	2	0/2	2/0	
17	Koperasi dan UKM	DINKOP UKM	6	6	0/6	6/0	
18	Penanaman Modal	DPMPT SP	5	5	0/5	5/0	
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
20	Statistik	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
21	Persandian	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
22	Kebudayaan	DINDIKBUD	4	4	0/4	4/0	
23	Perpustakaan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
24	Kearsipan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	DKPP	3	3	0/3	3/0	
26	Pariwisata	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
27	Pertanian	DINAS PERTANIAN	5	5	0/6	6/0	
28	Perdagangan	DINPERINDAG	5	5	0/5	5/0	
29	Perindustrian	DINPERINDAG	3	1	0/1	1/2	

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPd	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Transmigrasi	DINNAKER	1	1	0/1	1/0	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
31	Sekretariat Daerah	SETDA	2	2	0/10	10/0	
32	Sekretariat DPRD	SETWAN	1	1	0/3	3/0	
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
33	Perencanaan	BAPPELITBANGDA	2	2	0/6	6/0	
34	Keuangan	BAKEUDA	3	3	0/6	6/0	
35	Kepegawaian	BKPPD	1	1	0/4	4/0	
36	Pendidikan dan Pelatihan	BKPPD	1	1	0/1	1/0	
37	Penelitian dan Pengembangan	BAPPELITBANGDA	1	1	0/1	1/0	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
38	Inspektorat	INSPEKTORAT	2	2	0/3	3/0	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN						
39	Kecamatan	KECAMATAN	5	5	0/5	5/0	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	5	5	0/5	5/0	
JUMLAH			135	131	175	175/4	

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran perencanaan yang kedua sebesar 97,52% dari hasil perhitungan jumlah program, indicator, dan target RKPD dengan RPJMD. Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.9.
Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan
Bappelitbangda Tahun 2022**

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan				
	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	72	75,26	104,53
2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan				
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	96	97,52	101,58

Hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja adalah:

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data statistic untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

1. Mendampingi OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan perjanjian kinerja OPD.

2. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam mencapai indikator kinerja OPD.
3. Memaksimalkan rencana kegiatan bagi OPD sesuai dengan tujuan sasaran OPD.
4. Rutin melakukan evaluasi jumlah program dan tingkat ketecapaiannya.

Sasaran ketiga yang harus dicapai pada tahun 2022 adalah meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Sasaran tersebut ditandai dengan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Pada tahun 2022 Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Purbalingga Expo sebagai bentuk kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian peran kelitbangan dalam pembangunan dengan melaunching dan mempublikasikan 176 inovasi dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat. Kegiatan “Purbalingga Expo Inovasi Daerah Tahun 2022” yang diharapkan dapat memberikan pengenalan, pemahaman, sosialisasi, dan promosi kepada masyarakat luas terkait Inovasi Daerah yang terdapat di Kabupaten Purbalingga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga.

Dari jumlah inovasi diharapkan dapat menggambarkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga berusaha memaksimalkan kinerja dengan perubahan dan pembaruan untuk mencapai kinerjanya secara efektif, menjaga relevansinya yang pada giliran akan memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat dan dapat dipandang sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) menuju organisasi publik yang berkinerja tinggi (OBT). Capaian indikator kinerja sasaran ketiga sebesar 132,58%. Pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10.
Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Litbang
Bappelitbangda Tahun 2022

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Peran Kelitbangtan dalam Pembangunan				
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangtan	Persen	75	99,44	132,58

Melihat tabel diatas pencapaian indikator urusan kelitbangtan pada tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur – unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia. Tahun 2022 Kabupaten Purbalingga telah mengikuti kegiatan kelitbangtan seperti kreatifitas dan inovasi ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan pemanfaatan dijadikan sebagai hasil kelitbangtan. Beberapa temuan perekayasa inovasi yang diterapkan dan difasilitasi kelanjutan tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.11.
Penerapan dan Fasilitasi Kelanjutan Inventor Purbalingga
Tahun 2015 – 2022

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
2015	Budidaya ayam organik Jawa Super	Parwoto / Purwanto	-
2016	Teleskop Batu Akik (TELESKIK)	Anjat Saputra	-

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
2017	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	1. Dian Sulistiono 2. Hartoyo Karsin 3. Dewi 4. Upit Haryanto 5. Rahmat Hidayat	Fasilitasi Hak Paten
2018	- Pengembangan Pemijahan Gurame Metode Kolam Terpal Air Dangkal	1. Marbowo Laksono 2. Mohaman Soimun	- Fasilitasi HAKI - Pengembangan melalui DPA DKPP
	- ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Purbalingga	1. Yusron Mubarok 2. Cicih Nurkaeti 3. Amelia Fauzana	
2020	- Gamified Massive Open Online Cours Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)	1. Soleh Nur Hayat 2. Rujianto Eko Saputro	
	- Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)	Singgih Ardiansyah	Fasilitasi HAKI
2021	- Limbah Pustaka	RR Hendarti, S.Sos	Pelatihan Printing Cap bahan Limbah Kertas
2022	- Pemanfaatan Milimas (Minyak Limbah Masker) sebagai Alternatif Bahan Bakar Minyak	Krishna Adhie Christan	Fasilitasi Hak Cipta/Merk di tingkat Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Bappelitbangda Kab.Purbalingga, 2022

Adapun langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Litbang
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Ijin Penelitian/KKN).

3. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.
4. Mempertemukan individu/Lembaga Penemu/penghasil inovasi di satu sisi dengan Dunia Usaha/Masyarakat selaku Penggunanya
5. Pengembangan Inovasi Daerah.

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tingkat ketersediaan data evaluasi pembangunan daerah, dalam hal ini untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan menilai tingkat keterisian data IKK, SDG's, Indikator Program, Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu, dan Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel II.12.
Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Tingkat keterisian data IKK, SDG's, Indikator Program	81,7 %	82.98 %	101.56 %
2	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan	100 %	87,5 %	87,5 %

1) Tingkat keterisian data IKK, SDG's, Indikator Program

Tingkat keterisian data IKK, SDG's, Indikator Program merupakan satu kesatuan data yang terdapat dalam Satu Data Purbalingga. Di dalam Satu Data Purbalingga tersebut terdapat

37 aspek yang berisi daftar data prioritas yang berasal dari daftar data yang dikumpulkan oleh Produsen Data baik OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun instansi vertikal dan BUMD.

Indikator tingkat keterisian data dihitung dari perbandingan antara jumlah elemen data yang terisi dengan jumlah keseluruhan elemen data. Dari 37 aspek Satu Data Purbalingga jumlah keseluruhan elemen data yaitu sebanyak 2703 elemen dan jumlah elemen data yang terisi untuk tahun 2022 yaitu sebanyak 2243 elemen data. Dari jumlah tersebut dihasilkan tingkat keterisian data sebesar 82,98%.

2) Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu

Dokumen evaluasi merupakan laporan evaluasi pelaksanaan program RKPD yang memuat capaian berdasarkan indikator yang terdapat dalam Renstra dan Renja masing-masing Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi RKPD tersebut dilaksanakan setiap triwulan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dapat dicapai.

Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah OPD yang mengumpulkan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan dengan jumlah total OPD. Jumlah total OPD yang dihitung yaitu sebanyak 47 OPD dengan rincian 29 OPD dan 18 kecamatan. Dari 47 OPD tersebut yang mengumpulkan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu sampai dengan triwulan IV sebanyak 47 OPD, sehingga persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulan tepat waktu pada tahun 2022 yaitu 100 %.

3) Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan

Pada program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan program koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah selain bertujuan menjaga kualitas dokumen perencanaan juga ditujukan dalam rangka menjamin ketepatan waktu dan ketepatan prosedur. Ketepatan waktu menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja dokumen setelahnya yakni penyusunan renja OPD, penyusunan KUA-PPAS dan Penyusunan APBD. Menurut Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPD paling lambat ditetapkan pada bulan Juni tahun n-1.

Untuk memudahkan penghitungan capaian indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu maka pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai kuantitatif dengan asumsi sebagai berikut RKPD ditetapkan tepat bulan juni dinilai 100; RKPD ditetapkan pada bulan Juli dinilai 75; RKPD ditetapkan pada bulan Agustus dinilai 50; RKPD ditetapkan pada bulan September dinilai 25; RKPD tidak disusun 0). Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu	Tepat waktu	100	75	75

RKPD disusun dan legalitasnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022.

Selain bertujuan menjaga kualitas dokumen perencanaan yang menjamin ketepatan waktu, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan program koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah juga ditunjukkan dalam rangka menjamin ketepatan prosedur. Di atas telah dilaporkan capaian kinerja indikator dokumen perencanaan disusun tepat waktu, sedangkan indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur dapat dijelaskan bahwa keberhasilan indikator ketepatan prosedur ini akan menjamin akuntabilitas kinerja perencanaan.

Seluruh langkah dan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan dapat diuji dan ditelusuri kembali prosesnya. Prosedur yang menjadi pedoman adalah Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPD minimal melalui 4 (empat) tahap yakni Konsultasi Publik, Musrenbangcam, Forum OPD, Musrenbangkab. Untuk memudahkan penghitungan capaian indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur maka pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai kuantitatif dengan asumsi sebagai berikut RKPD disusun melewati 4 tahapan dinilai 100; RKPD disusun melewati 3 tahapan dinilai 75; RKPD disusun

melewati 2 tahapan dinilai 50; RKPD disusun melewati 1 (satu) tahapan dinilai 25; RKPD tidak disusun 0 (nol). Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel di bawah ini.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur	Tepat prosedur	100	100	100

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku, Konsultasi publik Ranwal RKPD Kab. Purbalingga Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022, kemudian Musrenbangcam dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022, kemudian Forum OPD dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Maret 2022, dan terakhir Musrenbangkab dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah keselarasan dan tingkat capaian kinerja dokumen perencanaan, dalam hal ini untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan mengukur Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang ekonomi, Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel II.13.
**Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022**

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	96,46 %	79,04 %	81,94 %
2	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang ekonomi	95,12 %	94,78 %	99,64 %
3	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan program renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	94,74 %	100 %	105,56 %

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran dari program ini adalah penerapan inovasi dalam pembangunan daerah, untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan mengukur cakupan Inovasi dan Inovasi yang didesiminasikan. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel II.14.
**Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2022**

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Inovasi dan Inovasi yang didesiminasikan	34,29 %	96,20 %	280,57 %

Inovasi pada tahun 2022 merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan LAN RI dalam bentuk laboratorium inovasi sejumlah 176 inovasi dan inovasi masyarakat yang difasilitasi adalah sejumlah 8 inovasi, sehingga terdapat 184 inovasi daerah. Dari 184 inovasi 177 diantaranya dilakukan deseminasi pada gelar inovasi dan potensi daerah pada tanggal 15 sampai dengan 18 Desember 2022, sedangkan 1 inovasi diberikan fasilitasi pelatihan hak cipta/merk di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Sasaran dari program ini adalah Menguatnya kelembagaan Bappelitbangda, untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan mengukur Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti, Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Persentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan, Persentase pengadaan barang milik daerah, Persentase pemeliharaan barang milik daerah. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matik dibawah ini :

Tabel II.15.
Capaian Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Indikator Program	Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %	100 %	100 %
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %

1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja

Dalam hal ini Bappelitbangda mempunyai kewajiban menyusun beberapa dokumen diantaranya Renja, LKPJ, LKjIP, SPIP, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, SAKIP OPD. Pada tahun 2022 untuk ketersediaan laporan capaian kinerja Bappelitbangda memasang target sebesar 100 %, dengan realisasi 100 % sesuai target yang ditentukan.

2) Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti

Pada tahun 2022 Bappelitbangda tidak menjadi obyek pemeriksaan baik dari BPK ataupun Inspektorat.

3) Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga no 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Pasal (5) huruf (e) fungsi Bappelitbangda yaitu pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan yang mana mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Pada tahun 2022 Bappelitbangda memasang target 100%, dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai target yang ditentukan.

4) Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan

Dalam hal ini Bappelitbangda mempunyai kewajiban melaksanakan pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai dengan ketentuan, pengelolaan administrasi ini dilakukan setiap bulannya dan dilakukan rekonsiliasi aset setiap triwulanan di bidang aset pada Bakeuda. Pada tahun 2022 bappelitbangda memasang target sebesar 100%, dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditentukan.

5) Persentase pengadaan barang milik daerah

Pada tahun 2022 Bappelitbangda melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Target yang

dipasang pada pengadaan ini sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% sesuai target yang ditentukan.

6) Persentase pemeliharaan barang milik daerah

Dalam hal ini bappelitbangda mempunyai kewajiban melakukan pemeliharaan semua aset yang ada, dari bangunan gedung kantor, kendaraan bermotor, dan juga peralatan dan mesin lainnya. Pada tahun 2022 bappelitbangda memasang target 100 %, dan dapat terealisasi 100 % sesuai dengan target yang ditentukan.

Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel II.16.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda				Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan I: Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas											
1	Skor komponen perencanaan dalam penilaian SAKIP	-	-	21	22	23	24	21,86	22	23	24	
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda											
1.1	Nilai SAKIP Bappelitbangda	-	-	72	75	78	80	75,26	75	78	80	
	Program 1: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
1.1.1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.4	Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.5	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda				Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran 2. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan											
1.2	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD (selarasnya program, indikator program dan target)	-	-	96	96	97	98	97,52	96	97	98	
	Program 2: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
1.2.1	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	-	-	100	100	100	100	87.5	100	100	100	
1.2.2	Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program	-	-	81,7	82,3	83	83,6	82.98	82,3	83	83,6	
1.2.3	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	-	-	100	100	100	100	87.23	100	100	100	
	Program 3: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
2.3.1	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	-	-	96,46	97,05	97,64	98,23	79.05	97,05	97,64	98,23	
2.3.2	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi	-	-	95,12	95,12	95,12	96,75	94.78	95,12	95,12	96,75	

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda				Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.3	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	94,74	94,74	94,74	96,49	100	94,74	94,74	96,49	
Sasaran 3. Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan												
1.3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	75	76	76,9	77,8	99,4	76	76,9	77,8	
Program 4: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
1.4.1	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	-	-	34,29	35,71	37,14	38,57	96,2	35,71	37,14	38,57	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda, antara lain:

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data statistik untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Ketersediaan sumberdaya kelitbang terbatas (kelembagaan (setara es IV), manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi)
4. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan pembangunan daerah
5. Belum disusunnya grand design kelitbang sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.

Tantangan yang dihadapi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Rekomendasi Kemenpan RB terkait nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dalam perencanaan kinerja bahwa:

- a. Terdapat rumusan sasaran dan indikator kinerja pada beberapa OPD belum memenuhi kriteria kualitas baik, terutama terkait dengan karakteristik keterukuran, orientasi hasil dan kesesuaian dengan level pengampu kinerja sehingga perlu melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi.
 - b. Penjenjangan/*cascading* kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga perlu melakukan reviu dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas *cascading* sebagai dasar penyempurnaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja.
2. Menurunnya skor IDSD Kabupaten Purbalingga pada Penilaian Tahun 2022
 3. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.

Dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi dapat disimpulkan bahwa isu strategis bappelitbangda sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) dengan (RPJMD) dan konsistensi dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja) dengan (Renstra) serta dokumen APBD;
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, ebudgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;

4. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Purbalingga terkait Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Penyusunan peta jalan kelitbang sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.
6. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappelitbangda. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Dalam menjawab isu-isu strategis Bappelitbangda, upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Pengintegrasian pemanfaatan teknologi informasi pada sistem perencanaan pembangunan (SIPD-RI) dan aplikasi evaluasi kinerja.
2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas (Bimtek) Implementasi Regulasi dan Kebijakan bagi ASN Bappelitbangda guna penguatan kompetensi dan penyediaan sarana prasarana serta penerapan standar dan prosedur kerja.
3. Penyusunan peta jalan kelitbang dan penerapan kelitbang sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.17.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						PERENCANAAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah	BAPPELI TBANGD A	100 100 100 100 100	persen Persen Persen Persen persen	4,829,853,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	BAPPELI TBANGD A	100 100 100 100 100	persen Persen Persen Persen persen	5,288,954,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	an daerah - Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan - Presentase pengadaan barang milik daerah - Presentase pemeliharaan barang milik daerah						- Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan - Presentase pengadaan barang milik daerah - Presentase pemeliharaan barang milik daerah					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELI TBANGDA	100	persen	20,900,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELI TBANGDA	100	persen	11,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	BAPPELI TBANGDA	3	dokumen	11,900,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	BAPPELI TBANGDA	3	dokumen	6,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Daerah						Daerah					
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELI TBANGD A	6	Laporan	9,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELI TBANGD A	6	Laporan	5,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	BAPPELI TBANGD A	100	Persen	3,919,590,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	BAPPELI TBANGD A	100	Persen	4,282,067,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELI TBANGD A	29	Orang/bulan	3,711,377,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELI TBANGD A	29	Orang/bulan	4,007,729,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELI TBANGD A	192	Dokumen	196,911,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELI TBANGD A	192	Dokumen	176,561,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPELI TBANGD A	600	dokumen	11,302,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPELI TBANGD A	600	dokumen	97,777,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELI TBANGD A	100	persen	16,280,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELI TBANGD A	100	persen	11,880,000	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPELI TBANGD A	4	laporan	16,280,000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPELI TBANGD A	4	laporan	11,880,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	BAPPELI TBANGD A	43	orang	20,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	BAPPELI TBANGD A	43	orang	50,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	BAPPELI TBANGD A	11	orang	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	BAPPELI TBANGD A	11	orang	20,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	dan Pelatihan						Pelatihan					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELI TBANGD A	47	orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELI TBANGD A	47	orang	30,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BAPPELI TBANGD A	12	bulan	56,327,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BAPPELI TBANGD A	12	bulan	112,503,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	10	paket	4,400,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	10	paket	9,400,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan	BAPPELI TBANGD A	10	paket	23,543,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	BAPPELI TBANGD A	10	paket	39,393,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Logistik Kantor yang disediakan						Kantor yang disediakan					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	12	dokumen	2,574,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	12	dokumen	2,400,000	
Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BAPPELI TBANGD A	12	Laporan	6,600,000	Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BAPPELI TBANGD A	12	Laporan	9,600,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELI TBANGD A	12	laporan	15,250,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELI TBANGD A	12	laporan	23,750,000	
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	BAPPELI TBANGD A	12	dokumen	3,960,000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	BAPPELI TBANGD A	24	dokumen	27,960,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Elektronik pada SKPD						Elektronik pada SKPD					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BAPPELI TBANGD A	12	buah	100,300,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BAPPELI TBANGD A	12	buah	67,500,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	11	unit	80,300,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	11	unit	67,500,000	
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	2	unit	20,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	2	unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPELI TBANGD A	12	bulan	392,186,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPELI TBANGD A	12	bulan	471,700,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPELI TBANGD A	12	laporan	1,520,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPELI TBANGD A	12	laporan	1,520,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	12	laporan	81,990,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	12	laporan	82,400,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	12	laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	12	laporan	15,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	14	laporan	307,176,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPELI TBANGD A	15	laporan	372,780,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BAPPELI TBANGD A	12	bulan	304,270,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaan ya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah	BAPPELI TBANGD A	12	bulan	282,304,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPPELI TBANGD A	29	unit	210,285,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPPELI TBANGD A	29	unit	227,035,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPPELI TBANGD A	10	unit	23,985,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPPELI TBANGD A	10	unit	25,269,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	BAPPELI TBANGD A	1	unit	70,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di	BAPPELI TBANGD A	1	unit	30,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Direhabilitasi						rehabilitasi					
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	BAPPELI TBANGD A	- 100 - 82.96 - 100	persen persen persen	1,251,331,000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	BAPPELI TBANGD A	- 100 - 82.96 - 100	persen persen persen	1,099,350,000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang	BAPPELI TBANGD A	100	persen	1,050,282,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang	BAPPELI TBANGD A	100	persen	909,850,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	disusun sesuai dengan ketentuan						disusun sesuai dengan ketentuan					
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELI TBANGD A	284	dokumen	200,000,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELI TBANGD A	284	dokumen	59,850,000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELI TBANGD A	5	berita acara	350,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELI TBANGD A	5	berita acara	350,000,000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPELI TBANGD A	5	dokumen	500,282,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPELI TBANGD A	5	dokumen	500,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELI TBANGD A	100	persen	85,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELI TBANGD A	100	persen	77,500,000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPPELI TBANGD A	1	masukan	85,000,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPPELI TBANGD A	1	masukan	77,500,000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	BAPPELI TBANGD A	100	persen	116,049,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	BAPPELI TBANGD A	100	persen	112,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Ke giatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPPELI TBANGD A	2	laporan	68,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPPELI TBANGD A	2	laporan	62,000,000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPELI TBANGD A	4	laporan	48,049,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPELI TBANGD A	4	laporan	50,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program	BAPPELI TBANGD A	97.64 95.12 94.74	persen persen persen	528,080,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan	BAPPELI TBANGD A	97.64 95.12 94.74	persen persen persen	934,775,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPELI TBANGD A	33	dokumen	198,396,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPELI TBANGD A	33	dokumen	403,675,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (10 OPD dan 18 kec)	BAPPELI TBANGDA	28	dokumen	93,396,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (10 OPD dan 18 kec)	BAPPELI TBANGDA	28	dokumen	168,200,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELI TBANGDA	5	dokumen	75,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (5OPD)	BAPPELI TBANGDA	5	dokumen	149,250,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	(5OPD)											
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELI TBANGD A	4	laporan	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELI TBANGD A	4	laporan	86,225,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	BAPPELI TBANGD A	6	dokumen	173,935,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	BAPPELI TBANGD A	6	dokumen	215,550,000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP) (4 OPD)	BAPPELI TBANGDA	4	dokumen	73,935,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP) (4 OPD)	BAPPELI TBANGDA	4	dokumen	145,275,000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPELI TBANGDA	2	laporan	35,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPELI TBANGDA	2	laporan	25,000,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	BAPPELI TBANGDA	2	dokumen	65,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	BAPPELI TBANGDA	2	dokumen	45,275,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPELI TBANGDA	6	dokumen	155,749,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPELI TBANGDA	6	dokumen	315,550,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	BAPPELI TBANGDA	2	dokumen	50,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	BAPPELI TBANGDA	3	dokumen	146,850,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (4 OPD)	BAPPELI TBANGDA	4	dokumen	50,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (4 OPD)	BAPPELI TBANGDA	3	dokumen	145,275,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Rencana dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPPELITBANGDA	2	laporan	55,749,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Rencana dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPPELITBANGDA	2	laporan	23,425,000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	BAPPELITBANGDA	37.14	persen	169,575,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	BAPPELITBANGDA	37.14	persen	1,039,760,000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitas	BAPPELITBANGDA	70	inovasi	169,575,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitas	BAPPELITBANGDA	70	inovasi	1,039,760,000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang	BAPPELITBANGDA	297	laporan	100,000,000	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi	BAPPELITBANGDA	7	laporan	989,760,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Teknologi dan Inovasi						dan Inovasi					
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELI TBANGD A	2	laporan	69,575,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELI TBANGD A	2	laporan	50,000,000	
					6,778,839,000						8,362,839,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu sumber program/kegiatan adalah usulan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Usulan dimaksud berasal dari kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat / LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Terhadap usulan-usulan tersebut, dilakukan penelaahan kesesuaian dengan mempersandingkannya terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Terhadap usulan -usulan yang sesuai diakomodasikan dalam bentuk program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam hal ini tidak ada usulan masyarakat yang mengkait dengan kegiatan Bappelitbangda pada aplikasi SIPD-RI.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagai tindak lanjut dengan telah dilantikannya Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu tahun 2019, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional /RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 27 Januari 2020.

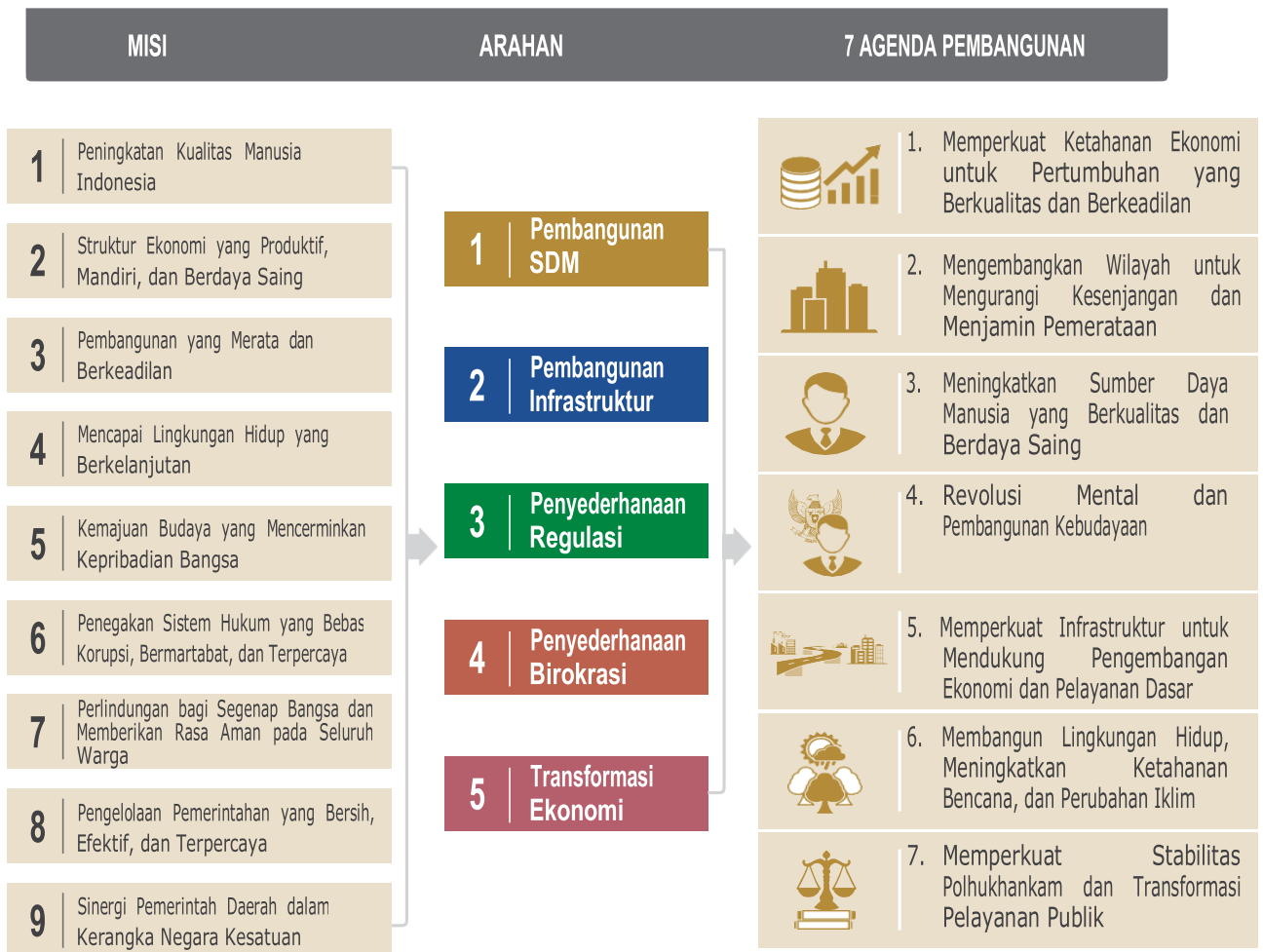
Dokumen perencanaan ini memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian / Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

VISI PRESIDEN



Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong



Dari ketujuh Agenda Pembangunan, Bappelitbangda merupakan perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan Agenda ke 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan /

Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam hal ini Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan Negara, melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi “*think thank*” dan “*engine of tomorrow*” di bidang perencanaan dan Penelitian-Pengembangan daerah, maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan

yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 adalah :

**"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;

- g Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah secara berkesinambungan (*sustainable*) dan terus menerus seiring adanya tuntunan pembangunan.

Tujuan jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016– 2021 terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas (*Specific, Measurable, Acievable, Realistic, Timebound*)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional,

transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*). Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan Meningkatnya Untuk Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya nilai AKIP komponen perencanaan.

Dalam mencapai keberhasilan tujuan jangka menengah Bappelitbangda periode 2021-2026 didukung oleh 2 (dua) sasaran strategi Bappelitbangda yaitu:

- 1) **Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan**
Keselarasan dokumen perencanaan ditandai dengan tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.
- 2) **Meningkatnya Peran Kelitbang Dalam Pembangunan**
Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang. Dalam menciptakan kinerja pemerintahan yang baik (*good governance*) keberadaan litbang dalam susunan organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis, sebagai "*think thank*" harus mampu menjawab permasalahan dan memberikan solusi yang konkrit bagi pembangunan daerah.
- 3) **Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda**
Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda ditandai dengan meningkatnya nilai Sakip Bappelitbangda. Penilaian Sakip Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai Tim Penilai Sakip di Tingkat Kabupaten. Sakip mempunyai

peran strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.

Tujuan dan Sasaran serta indikator target Bappelitbangda tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	SATUAN
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			23	ANGKA
	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	97	PERSEN
	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	76,9	PERSEN
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	78	ANGKA

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda dengan dukungan perangkat daerah lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Program, Kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN				
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 100 100 100 100	persen Persen Persen Persen persen	4.626.409.000
5.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	4.565.000
5.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2.490.000
5.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	2.075.000
5.01.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	Persen	3.874.905.000
5.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang/bulan	3.704.505.000
5.01.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	192	Dokumen	130.000.000
5.01.01.202.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600	dokumen	40.400.000
5.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	5.200.000
5.01.01.203.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	5.200.000
5.01.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	43	orang	35.000.000
5.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	orang	15.000.000
5.01.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43	orang	20,000,000
5.01.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12	bulan	53.962.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	8.800.000
5.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	paket	24.800.000
5.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	996.000
5.01.01.206.08	Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	4.739.000
5.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	6.227.000
5.01.01.206.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24	dokumen	8.400.000
5.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	buah	-
5.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	unit	-
5.01.01.207.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	unit	-
5.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	428.610.000
5.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	630.000
5.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	82,800,000
5.01.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	laporan	622.000
5.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	laporan	344.558.000
5.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12	bulan	224.167.000
5.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	unit	214.167.000
5.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	5.000.000
5.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 82.96 100	persen persen persen	650.913.000
5.01.02.201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	556.734.000
5.01.02.201.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	284	dokumen	47.880.000
5.01.02.201.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	berita acara	159.600.000
5.01.02.201.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8	dokumen	349.254.000
5.01.02.202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	22.420.000
5.01.02.202.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Dokumen	22.420.000
5.01.02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	100	persen	71.759.000
5.01.02.203.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	laporan	18.028.000
5.01.02.203.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	laporan	53.731.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPd bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPd bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPd bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	97.64 95.12 94.74	persen persen persen	526.450.000
5.01.03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	34	dokumen	278.940.000
5.01.03.201.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (10 OPD dan 18 kec)	28	dokumen	93.315.000
5.01.03.201.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (5OPD)	5	dokumen	99.400.000
5.01.03.201.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	laporan	86,225,000
5.01.03.202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	6	dokumen	113.090.000
5.01.03.202.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (4 OPD)	4	dokumen	71.088.000
5.01.03.202.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2	laporan	20.000.000
5.01.03.202.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (2 OPD)	2	dokumen	22.002.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03.203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Wilayah	6	dokumen	134.420.000
5.01.03.203.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (2 OPD)	3	dokumen	57.480.000
5.01.03.203.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	laporan	18.740.000
5.01.03.203.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (4 OPD)	3	dokumen	58.200.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi dan Invensi yang didesiminasikan	37.14	persen	1.021.048.000
5.05.02.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitas	70	inovasi	1.021.048.000
5.05.02.204.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	7	laporan	989,760,000
5.05.02.204.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2	laporan	31.288.000
		TOTAL			6.824.820.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 yang dapat di lihat pada tabel IV.1, sebagai berikut:

Tabel IV.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01		PERENCANAAN									
	Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja - Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti - Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - Presentase Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan - Persentase pengadaan barang milik daerah - Persentase pemeliharaan barang milik daerah	BAPPELITBANGDA	100 100 100 100 100 100	persen Persen Persen Persen persen	4,626,409,000	DAU		100 100 100 100 100 100	5,288,954,000
5.01.01.201	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELITBANGDA	100	persen	4,565,000			100	11,000,000
5.01.01.201.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	2	dokumen	2,490,000			2	6,000,000
5.01.01.201.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELITBANGDA	6	Laporan	2,075,000			5	5,000,000
5.01.01.202	Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	BAPPELITBANGDA	100	Persen	3,874,905,000			100	4,282,067,000
5.01.01.202.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELITBANGDA	29	Orang/bulan	3,704,505,000			31	4,007,729,000

5.01.01.202.02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELITBANGDA	192	Dokumen	130,000,000			195	176,561,000
5.01.01.202.04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	BAPPELITBANGDA	600	dokumen	40,400,000			3	97,777,000
5.01.01.203	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah sesuai	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELITBANGDA	100	persen	5,200,000			100	11,880,000
5.01.01.203.06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPELITBANGDA	4	laporan	5,200,000			2	11,880,000
5.01.01.205	Meningkatnya pemahaman ASN sesuai dengan tugas fungsinya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	BAPPELITBANGDA	43	orang	35,000,000			11	50,000,000
5.01.01.205.09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPPELITBANGDA	11	orang	15,000,000			11	20,000,000
5.01.01.205.11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELITBANGDA	43	orang	20,000,000			43	30,000,000
5.01.01.206	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BAPPELITBANGDA	12	bulan	53,962,000			12	112,503,000
5.01.01.206.01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	10	paket	8,800,000			10	9,400,000
5.01.01.206.04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	BAPPELITBANGDA	10	paket	24,800,000			12	39,393,000
5.01.01.206.06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	dokumen	996,000			24	2,400,000
5.01.01.206.08	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BAPPELITBANGDA	12	Laporan	4,739,000			12	9,600,000
5.01.01.206.09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELITBANGDA	12	laporan	6,227,000			12	23,750,000

5.01.01.206.11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPELITBANGDA	12	dokumen	8,400,000			12	27,960,000
5.01.01.207	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BAPPELITBANGDA	12	buah	-			3	67,500,000
5.01.01.207.02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	BAPPELITBANGDA	-	unit	-			-	-
5.01.01.207.06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	BAPPELITBANGDA	-	unit	-			3	67,500,000
5.01.01.208	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	BAPPELITBANGDA	12	bulan	428,610,000			12	471,700,000
5.01.01.208.01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	BAPPELITBANGDA	12	laporan	630,000			12	1,520,000
5.01.01.208.02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	laporan	82,800,000			12	82,400,000
5.01.01.208.03	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	12	laporan	622,000			12	15,000,000
5.01.01.208.04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPELITBANGDA	14	laporan	344,558,000			15	372,780,000
5.01.01.209	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BAPPELITBANGDA	12	bulan	224,167,000			12	282,304,000
5.01.01.209.02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPPELITBANGDA	29	unit	214,167,000			29	227,035,000
5.01.01.209.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPPELITBANGDA	10	unit	5,000,000			10	25,269,000

5.01.01.209.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BAPPELITBANGDA	1	unit	5,000,000			1	30,000,000
5.01.02	- Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah - Tingkat ketersediaan data evaluasi pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program - Presentase	BAPPELITBANGDA	100 82.96 100	persen persen persen	650,913,000			100 84.21 100	676,999,400
5.01.02.201	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan	BAPPELITBANGDA	100	persen	556,734,000			100	487,499,400
5.01.02.201.02	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	284	dokumen	47,880,000			284	47,880,000
5.01.02.201.05	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELITBANGDA	5	berita acara	159,600,000			5	199,500,000
5.01.02.201.07	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPELITBANGDA	8	dokumen	349,254,000			3	240,119,400
5.01.02.202	Ketersediaan dokumen analisa data dan informasi sesuai ketentuan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELITBANGDA	100	persen	22,420,000			100	77,500,000
5.01.02.202.01	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPPELITBANGDA	1	dokumen	22,420,000			3	77,500,000
5.01.02.203	ketersediaan dokumen evaluasi OPD	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	BAPPELITBANGDA	100	persen	71,759,000			100	112,000,000

5.01.02.203.01	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPPELITBANGDA	2	laporan	18,028,000			2	62,000,000
5.01.02.203.03	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA	4	laporan	53,731,000			4	50,000,000
5.01.03	- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra kerja bidang ekonomi - Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra kerja bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	BAPPELITBANGDA	97.64 95.12 94.74	persen persen persen	526,450,000			98.23 96.75 96.49	934,775,000
5.01.03.201	OPD yang difasilitasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan Laporan Kinerja	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan	BAPPELITBANGDA	34	dokumen	278,940,000			24	403,675,000
5.01.03.201.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	28	dokumen	93,315,000			28	168,200,000

5.01.03.201.05	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	5	dokumen	99,400,000			6	149,250,000
5.01.03.201.08	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELITBANGDA	4	laporan	86,225,000			4	86,225,000
5.01.03.202	OPD yang difasilitasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan Laporan Kinerja	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	BAPPELITBANGDA	6	dokumen	113,090,000			6	215,550,000
5.01.03.202.01	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	4	dokumen	71,088,000			4	145,275,000
5.01.03.202.04	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPELITBANGDA	2	laporan	20,000,000			4	25,000,000
5.01.03.202.05	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	2	dokumen	22,002,000			2	45,275,000
5.01.03.203	OPD yang difasilitasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPELITBANGDA	6	dokumen	134,420,000			6	315,550,000

5.01.03.203.01	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	BAPPELITBANGDA	3	dokumen	57,480,000			2	146,850,000
5.01.03.203.04	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPPELITBANGDA	2	laporan	18,740,000			2	23,425,000
5.01.03.203.05	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITBANGDA	3	dokumen	58,200,000			4	145,275,000
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	penerapan inovasi dalam pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan Inovasi dan Invensi yang	BAPPELITBANGDA	37.14	persen	1,021,048,000			38.57	1,039,760,000
5.05.02.204	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitas	BAPPELITBANGDA	70	inovasi	1,021,048,000			70	1,039,760,000
5.05.02.204.01	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPELITBANGDA	297	dokumen	989,760,000			297	989,760,000
5.05.02.204.04	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELITBANGDA	2	laporan	31,288,000			2	50,000,000
			TOTAL				6,824,820,000				7,940,488,400

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Purbalingga, 28 Juli 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700203 199001 1 001

BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.


BUPATI PURBALINGGA,
[Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
[Signature]
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN

	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan												
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah usulan perencanaan yang ditelaah	banyaknya usulan perencanaan yang tidak masuk penganggaran	ROO.23.36 .28.01	Kepala Badan	kurangnya sosialisasi prioritas pembangunan tahunan	internal	C	dokumen perencanaan berbasis keterlibatan masyarakat (<i>bottom up</i>) tidak tercapai	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	4	3	12	1. Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan 2. Sosialisasi prioritas pembangunan tahunan
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan diikuti (Musren RKPD, Musren Provinsi, Musren Nasional, Konsultasi Publik, dan Forum OPD)	terdapat tahapan perencanaan yang tidak dilaksanakan	ROO.23.36 .28.02	Kepala Badan	keterlambatan usulan perencanaan yang ditelaah	eksternal internal	C	dokumen perencanaan pembangunan tidak sesuai prosedur	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	3	3	9	1. Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan 2. Sosialisasi prioritas pembangunan tahunan
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun (Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, Permendagri 86 Tahun 2017)	tahapan penyusunan perencanaan tidak sesuai jadwal yang telah diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017	ROO.23.36 .28.03	Kepala Badan	keterlambatan usulan perencanaan yang ditelaah	eksternal internal	C	tidak tercapainya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD 3. Masyarakat	3	3	9	1. Penyusunan pedoman dan jadwal perencanaan pembangunan 2. Sosialisasi prioritas pembangunan tahunan 3. koordinasi secara intens dengan OPD terkait
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan												
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan daerah	tidak tersedia data yang valid untuk perencanaan pembangunan	ROO.23.36 .28.04	Kepala Badan	data tidak terkumpul secara lengkap	eksternal	C	data dukung untuk penyusunan dokumen pembangunan daerah tidak tersedia	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	3	12	1. desk dengan OPD secara intensif 2. Bappelitbangda menjadi ruang konsultasi bagi OPD sebelum pelaksanaan desk agar admin satu data OPD sudah mempersiapkan data yang disiapkan
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun												
5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja pembangunan daerah di Kabupaten/Kota	pelaksanaan pembangunan daerah kurang optimal	ROO.23.36 .28.05	Kepala Badan	kebijakan pusat dan daerah yang berubah-ubah	eksternal	UC	target dokumen pelaporan kinerja pembangunan daerah tidak tercapai	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD 3. Masyarakat				1. rutin melakukan evaluasi jumlah program dan tingkat ketepatannya 2. rutin koordinasi dengan pemerintah pusat
6	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan	Proses penyusunan laporan evaluasi RKPD oleh OPD belum terselesaikan	ROO.23.36 .28.06	Kepala Badan	Data realisasi kinerja dari bidang di OPD yang bersangkutan belum terkumpul	eksternal	C	capaian target evaluasi kinerja pembangunan tidak sesuai	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD				1. desk capaian evaluasi kinerja OPD setelah waktu triwulan selesai

	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia												
		Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi												
		Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah												
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disinkronisasikan (10 OPD dan 18 kec)	analisis permasalahan bidang pemerintahan kurang mendalam	ROO.23.36 .28.07	Kepala Badan	data dari OPD kurang lengkap	external	C	data dukung kelengkapan capaian kinerja untuk dokumen perencanaan tidak tersedia	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. desk dengan OPD lebih intensif 2. pembagian tugas yang lebih proporsional
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi(PATEN, RAN HAM)	terjadi ketidakcocokan jumlah program yang terfasilitasi akibat perubahan regulasi yang dinamis	ROO.23.36 .28.08	Kepala Badan	kebijakan pusat yang berubah-ubah	external	UC	pembaharuan data harus sering dilakukan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	3	12	1. rutin melakukan evaluasi jumlah program dan tingkat ketepatannya
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disinkronisasikan (6 OPD)	Masih terdapat dokumen perencanaan yang penyelesaiannya tidak sesuai tahapan dan isi yang tidak sesuai dengan permen 86	ROO.23.36 .28.09	Kepala Badan	sumber daya perencana di OPD sering kali memiliki beban kerja yang relatif besar sehingga tidak bisa fokus dalam penyelesaian dan penyempurnaan pekerjaan dokumen perencanaan	external	C	berdampak pada tidak selaras dan tidak sempurnanya dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan
10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Stunting, SDGs, AUSTS, Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	peran koordinasi dan fasilitasi BAPPELITBANGDA dalam program AUSTS membuat OPD yang terkait merasa bahwa program ini adalah milik Bappelitbangda dan membuat OPD terkait kurang berkomitmen dalam pelaksanaan program tersebut.	ROO.23.36 .28.10	Kepala Badan	OPD terkait kurang aktif dalam pelaksanaan program sedangkan undangan dan himbauan untuk hadir sudah selalu dikabarkan	external	C	berdampak pada tidak maksimalnya capaian program	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	4	3	12	1. Desk Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 2. Pembentukan Tim Pengawas Program

	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA												
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian yang disinkronisasikan (4 OPD)	masih terdapat ketidaksielarsan dokumen RPJMD, Renstra, Renja dan Cascading	ROO.23.36 .28.11	Kepala Badan	keterbatasan SDM dan Anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
12	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Kemiskinan, Road Map Pangan dan Gizi, PEL)	pengawasan terhadap keamanan pangan di kabupaten purbalingga tidak maksimal	ROO.23.36 .28.12	Kepala Badan	kurang maksimalnya kinerja satgas pangan dikabupaten purbalingga, dan kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan pengembangan ekonomi lokal	internal	C	berdampak pada tidak maksimalnya capaian program	1. Bupati 2. Kepala Bappelitbangda 3. OPD 4. Masyarakat	4	3	12	1. koordinasi dengan OPD terkait tentang kinerja satgas pangan 2. penganggaran untuk kegiatan pengembangan ekonomi lokal
13	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disinkronisasikan (2 OPD)	masih terdapat ketidaksielarsan dokumen RPJMD, Renstra, Renja dan Cascading	ROO.23.36 .28.13	Kepala Badan	seringnya perubahan kebijakan pusat	eksternal	UC	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan												
14	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang disinkronisasikan (2 OPD)	masih terdapat ketidaksielarsan dokumen RPJMD, Renstra, Renja dan Cascading	ROO.23.36 .28.14	Kepala Badan	keterbatasan SDM dan Anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
15			masih terdapat ketidaksielarsan pencapaian IKU oleh OPD karena keterbatasan anggaran	ROO.23.36 .28.15	Kepala Badan	keterbatasan anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
16			masih terdapat evaluasi kinerja yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	ROO.23.36 .28.16	Kepala Badan	keterbatasan anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
17	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah program Pemerintah Pusat yang terfasilitasi (Keciptakarya, Persampahan, Air Bersih Air Minum, dan permukiman)	1. penguasaan aplikasi yang kurang maksimal	ROO.23.36 .28.17	Kepala Badan	1. pergantian SDM sebagai operator aplikasi	eksternal	C	keterlambatan dalam pengisian aplikasi	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	diklat bimtek khusus operator baru

18			keterlambatan pengisian dokumen pada aplikasi	ROO.23.36 .28.18	Kepala Badan	kurangnya koordinasi antara pimpinan dan operator aplikasi	eksternal	C	tidak lengkapnya usulan dalam aplikasi	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	koordinasi dengan OPD, pengampu usulan aplikasi
19	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang disinkronisasikan (4 OPD)	masih terdapat ketidakselarasan dokumen RPJMD, Renstra, Renja dan Cascading	ROO.23.36 .28.19	Kepala Badan	keterbatasan SDM dan Anggaran pada OPD	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
20			masih terdapat ketidaksesuaian pencapaian IKU oleh OPD karena keterbatasan anggaran	ROO.23.36 .28.20	Kepala Badan	keterbatasan anggaran pada OPD	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
21			masih terdapat evaluasi kinerja yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	ROO.23.36 .28.21	Kepala Badan	keterbatasan anggaran	eksternal	C	kurang tepatnya dalam pencapaian dokumen perencanaan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD	4	2	8	1. koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait 2. penambahan anggaran untuk pencapaian target tahunan
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan Inovasi dan Inovensi yang didesiminasikan												
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Inovensi yang di Fasilitasi												
22	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah rekomendasi izin penelitian, jumlah inventur yang mengikuti lomba krenova, jumlah KKN	sosialisasi dan fasilitasi teknologi dan inovasi kurang optimal	ROO.23.36 .28.22	Kepala Badan	urgensi pengembangan teknologi dan inovasi	internal	C	inovasi dan inovensi yang difasilitasi tidak tercapai	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD 3. Masyarakat	4	3	12	1. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait 2. koordinasi dengan OPD/Lembaga/Masyarakat dalam pengembangan inovasi
23	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	terbatasnya inovasi dan inovensi yang dibuat	ROO.23.36 .28.23	Kepala Badan	kurangnya jalinan kerjasama dengan lembaga/OPD/masyarakat terhadap hasil-hasil litbang	eksternal	C	tidak terlaksananya sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	1. Kepala Bappelitbangda 2. OPD 3. Masyarakat	4	3	12	1. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait 2. koordinasi dengan OPD/Lembaga/Masyarakat dalam pengembangan inovasi

MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

BARIS 1	NAMA OPD		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	URUSAN YANG DIAMPU		URUSAN PERENCANAAN
	PROGRAM		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	KEGIATAN		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	SUB KEGIATAN		5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	TUJUAN SUB KEGIATAN		Menampung usulan masyarakat/stakeholder dalam kegiatan pembangunan daerah
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<p>Mempedomani :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permendagri 86 / 2017 ▪ Permendagri 70 / 2019 ▪ Permendagri 90 / 2019 ▪ Target SDGs; ▪ IKK dan SPM <p>Usulan dari tingkat Kelurahan/Desa/Kecamatan : usulan yang menyelesaikan isu kesenjangan gender diakomodir pada rumpun ekonomi dan social yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan pelatihan/workshop dalam peningkatan kompetensi seperti pelatihan kewirausahaan, UMKM, bantuan peralatan, dll.</p> <p>Berdasarkan Undanguan pelaksanaan musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2024 telah disebutkan bahwa perwakilan unsur-unsur pemerintahan desa dan masyarakat termasuk didalamnya Organissasi/kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk hadir dan ikutserta dalam perumusan prioritas usulan yang harus diakomodir. Adapun jumlah peserta :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laki-laki : 361 ▪ Perempuan/Disabilitas : 139
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang mayoritas dihadiri oleh laki-laki dan sangat sedikit kehadiran perempuan. • Ditinjau dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan musrenbang terlihat dari jumlah kehadiran perempuan dibanding undangan kepada tokoh perempuan • Ditinjau dari aspek kontrol, keterbatasan kehadiran perempuan menyebabkan kontrol mereka terhadap usulan dari kelurahan/desa apakah menjadi prioritas ditingkat kecamatan/dan kota menjadi sangat terbatas

			<ul style="list-style-type: none"> Ditinjau dari aspek manfaat, sasaran program dan kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk kaum laki-laki dan hanya sebagian kecil memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang.
		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan musrenbang yang tidak mengakomodir perempuan karena masih melaksanakan kegiatan rumah tangga Sebagian besar ASN yang berperan sebagai Narasumber dan fasilitator belum memahami secara detail tentang konsep gender
		Sebab Kesenjangan Eksternal (diluar kesenjangan 452 dan eksternal)	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan merasa bahwa urusan pembangunan merupakan urusan laki-laki Usulan perempuan, anak, disabilitas tidak banyak dan tidak berdasarkan analisis kebutuhan Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Menampung usulan masyarakat/stakeholder dalam kegiatan pembangunan daerah
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kehadiran Memfasilitasi peserta dengan bantuan transport Penyusunan instrument pembuatan skala prioritas dari usulan Pelaksanaan pra musrenbang Pelaksanaan Musrenbangkab
BARIS 6	BASELINE DATA		<p>Berdasarkan Undangan pelaksanaan musrenbang penyusunan RKPD Tahun 2024 telah disebutkan bahwa perwakilan unsur-unsur pemerintahan desa dan masyarakat termasuk didalamnya Organisasi/kelompok perempuan dan kelompok rentan untuk hadir dan ikutserta dalam perumusan prioritas usulan yang harus diakomodir. Adapun jumlah peserta :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Laki-laki : 361 <input type="checkbox"/> Perempuan/Disabilitas : 139
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja: Jumlah usulan masyarakat/stakeholder dalam dokumen perencanaan pembangunan yang memperhatikan spesifik perempuan, anak-anak, dan disabilitas</p> <p>Target Kinerja: 1800 usulan</p>
		Immediate	Indikator Kinerja: Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun

		Outcome/Kegiatan	sesuai dengan ketentuan Target Kinerja: 100%
		Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan Target Kinerja: 100%
		Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD Target Kinerja : 97%
		Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Skor Perencanaan Target Kinerja: 23